

## MENGHADIRKAN “MANUSIA IRONIS” DALAM KONTESTASI POLITIK 2024

Wahyu Budi Nugroho

Prodi Sosiologi, FISIP, Universitas Udayana; [wahyubudinug@unud.ac.id](mailto:wahyubudinug@unud.ac.id)

### ABSTRAK

*Penelitian ini berupaya mengkaji konsep manusia ironis Richard Rorty sebagai negasi atas politik identitas yang berpotensi muncul dalam kontestasi politik tanah air di tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode penelitian kualitatif berjenis studi pustaka. Karakter masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk kerap kali menyebabkan politik identitas muncul di setiap perhelatan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Secara sosiologis, politik identitas dibangun dari konsep identitas yang bersifat esensial, yakni identitas yang diyakini bersifat “terberi”, melekat, tetap, dan diterima secara apa adanya. Konsep identitas tersebut berlawanan dengan konsep-konsep identitas yang bersifat cair dan arbiter sebagaimana ditunjukkan oleh pemikiran Richard Rorty tentang manusia ironis. Manusia ironis Rorty menegaskan penolakannya terhadap imperatif kategoris dan “kosakata akhir”, sehingga manusia selalu terbuka baik bagi dirinya maupun orang lain. Melalui penelitian yang dilakukan, pemikiran tentang manusia ironis dapat mereduksi berbagai pola pikir esensial yang berpotensi memunculkan politik identitas. Adapun upaya terstrategis untuk memperkenalkan konsep manusia ironis pada khalayak luas di era informasi sekarang ini adalah melalui tulisan pop dan budaya populer.*

**Kata kunci:** Pemilu 2024; Manusia ironis; Politik identitas

### 1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural sekaligus masyarakat majemuk, artinya tidak sekadar memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beragam, tetapi juga cenderung memiliki sistem sosial dan sistem budaya yang cenderung berdiri sendiri antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Soekanto, 2014). Sejak zaman dahulu hingga kini, masyarakat tanah air telah berhasil menciptakan interseksi sosial sehingga keberagaman budaya dan adat-istiadat, termasuk sistem sosial dan sistem budaya yang berbeda-beda tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya solidaritas sosial dan persatuan nasional (Handoyo, dkk., 2015). Namun demikian, pasca-Reformasi 1998, di mana otonomi daerah mulai diberlakukan, hampir di setiap perhelatan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, isu politik identitas mulai menyeruak.

Secara sosiologis, politik identitas berbeda dari politik representasi, jika politik representasi berada di ranah budaya dan bertujuan untuk memperoleh “ruang budaya”, maka politik identitas berada di ranah politik dan berorientasi untuk memperoleh kekuasaan (Nugroho, 2020). Politik identitas dibangun berdasarkan konsep identitas yang bersifat esensial, yakni berbagai karakter yang diyakini bersifat “terberi”, apa adanya, dan melekat begitu saja. Sebagai misal, asal-usul suku bangsa, ras, bahkan agama—yang diwarisi secara turun-temurun (Barker, 2009). Hal-hal tersebutlah yang umumnya dieksploitasi untuk “menyangatkan” pemimpin politik tertentu yang dijagokan dalam kontestasi politik. Isu politik identitas inilah yang kiranya selalu “menginterupsi” keharmonisan sosial masyarakat tanah air di hampir setiap perhelatan politik baik di ranah lokal maupun nasional.

Contoh nyata dan signifikan politik identitas yang digunakan dalam perhelatan politik tanah air dapat dilihat lewat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres tahun 2014 dimana narasi-narasi berbau suku bangsa, ras, dan agama kental terasa. Tidak jarang, berbagai narasi tersebut menggelinding menjadi bola liar yang secara sengaja ataupun tidak memunculkan disinformasi, mis-informasi, hoaks, bahkan ujaran kebencian. Serangkaian hal tersebut tentu menjadi kontraproduktif bagi persatuan dan kesatuan nasional, termasuk dalam kontestasi politik itu sendiri, karena pada akhirnya kampanye politik tidak memuat hal-hal konstruktif seperti adu ide, gagasan, serta kebijakan yang berguna bagi masyarakat ke depannya, melainkan disesaki narasi-narasi yang bersifat “terberi”, yang sesungguhnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Implikasi yang terjadi kemudian pun jelas: kualitas demokrasi tanah air pun merosot karena ketiadaan pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis studi pustaka dan bersifat historis faktual mengingat pemikiran tokoh yang ditempatkan sebagai objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni upaya mengoleksi berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, paper, arsip, artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian (Moleong, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, sumber data primer adalah karya-karya Richard Rorty mengenai manusia ironis. Adapun sumber data sekunder merupakan berbagai karya lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sumber data primer. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika dengan berbagai unsur metodis seperti; metode interpretasi, metode induksi, metode koherensi intern, metode kesinambungan historis, dan metode deskripsi. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan setelah seluruh data dianalisis dan menjawab fokus penelitian (Bakker dan Zubair, 1994).

## 3. ANALISIS DATA

Esensialisme adalah pemikiran yang menganggap segala sesuatunya bersifat terberi, tetap, dan terus melekat. Awalnya, esensialisme adalah pemikiran yang bersifat organik, artinya lahir secara alamiah atau naluriah sejak manusia membentuk kelompok dan mulai berinteraksi dengan kelompok lain dalam wujudnya yang paling primitif. Perbedaan antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, baik secara kebiasaan, ritual, aksesori atau artefak budaya yang digunakan, serta terutama perbedaan ciri fisik itulah yang kemudian menjadi identitas pembeda antara satu kelompok dengan lainnya dan terus “disangatkan” mengingat adanya berbagai kepentingan lain seperti perebutan teritori, hewan buruan, atau upaya penguasaan berbagai sumberdaya lainnya (Harris, 2019). Hasil penelitian Emile Durkheim (2011) mengenai totem kiranya memperkuat hal di atas, kelompok masyarakat primitif umumnya meyakini adanya hubungan kekerabatan mereka dengan totem yang disakralkannya, begitu pula kelompok masyarakat primitif lain dengan totemnya.

Lebih jauh, Pencerahan Eropa yang menjadi gerbang pengarusutamaan rasionalitas nyatanya tidak lantas memberangus cara pikir dan cara pandang esensialis, melainkan melahirkannya kembali dalam wujud yang baru, bahkan lewat berbagai disiplin ilmu sosial-humaniora modern. Sebagai misal, psikologi freudian yang mengarakteristikan secara tegas gejala kejiwaan antara laki-laki dengan perempuan, ditunjukkan lewat pemikiran Sigmund Freud mengenai “cemburu penis”, atau John Stuart Mill yang menyangatkan perbedaan laki-laki dengan perempuan dalam konteks tanggung jawab ruang publik dengan ruang domestik, pun dalam konteks yang lebih luas, dapat pula dilihat lewat hadirnya teori-teori sosial modern, terutama yang tercermin lewat pemikiran Alex Inkeles (dalam Waseso, 1986) mengenai

perbedaan antara masyarakat Barat dengan masyarakat Timur, di mana masyarakat Timur cenderung diposisikan secara inferior, irasional, dan pasif-kontemplatif.

Secara lebih spesifik, pola pikir esensialisme ditemui dalam ranah gender, kelompok sosial, ras dan etnisitas, dan kelas sosial. Persoalan menjadi pelik ketika serangkaian hal tersebut bersinggungan dengan ranah politik yang berorientasi pada kekuasaan. Meskipun memang, tidak semua praktik esensialisme dalam ranah politik bersifat destruktif, sebagai misal, ditemui istilah “esensialisme strategis” dalam ranah politik yang berbasiskan nilai-nilai universal dan berupaya mencapai tujuan universal pula—kesetaraan, kesamaan hak, keadilan sosial. Para aktor dari gerakan esensialisme strategis ini bisa berasal dari minoritas gender, kelas sosial, atau ras tertentu yang telah melakukan konsolidasi untuk memperjuangkan hak-haknya (Barker, 2009).

Namun demikian, ketika politik esensialisme tidak berbasiskan dan berorientasi pada nilai-nilai universal; maka ia menjadi destruktif bagi masyarakat, terutama ketika pemahaman esensialisme menjelma menjadi politik identitas. Pada praktiknya, politik identitas berupaya menyangatkan atau mengeksploitasi hal-hal terberi pada satu kontestan politik dengan tujuan meraup suara konstituante sebanyak-banyaknya berdasarkan. Dalam masyarakat yang belum sepenuhnya rasional—juga pemilih yang belum sepenuhnya rasional—hal ini menjadi rentan bagi keharmonisan sosial karena dapat dengan mudah memecah belah masyarakat. Di samping itu, kualitas demokrasi pun merosot karena ruang publik dijejali oleh narasi kebencian, bukannya ide, gagasan, atau rencana kebijakan bagi masyarakat ke depannya.

Di era pascastrukturalisme, pemikiran esensialisme sedikit-banyak telah tergerus. Di era ini, para pemikir sosial-humaniora meyakini identitas sebagai sesuatu yang tidak stabil, terbentuk karena formasi sejarah tertentu, ilusif, bahkan sekadar dianggap sebagai investasi emosional lingkungan sosial yang sesungguhnya semu belaka. Salah satu pemikiran pascastrukturalisme yang hadir untuk menguatkan hal ini adalah pemikiran mengenai “manusia ironis” dari Richard Rorty. Rorty (1989) membangun pemikiran mengenai manusia ironis berbasiskan karakter bahasa yang arbitrer, tidak stabil, dan selalu terbuka bagi penafsiran ulang. Secara langsung, ia pun turut melakukan penolakan terhadap segala bentuk imperatif kategoris yang bersifat universal dan mapan, yang umumnya diwariskan secara turun-temurun, selalu didengarkan “pemimpin yang kuat”, serta pada akhirnya diterima secara apa adanya.

Terkait imperatif kategoris, Rorty (1989) membagi dua jenis manusia, yaitu “manusia serius”—atau yang juga disebut “manusia metafisik”—serta “manusia ironis”. Manusia serius adalah mereka yang menerima imperatif kategoris tanpa mempertanyakannya, menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis* ‘apa adanya’, dan telah ditentukan begitu saja. Bagi Rorty, imperatif kategoris bekerja layaknya “kosakata akhir” di mana tidak ada lagi “kosakata lanjutan”, melainkan cukup berhenti sampai di situ, pun diterima begitu saja tanpa koreksi. Hal ini kiranya turut menemui bentuknya sebagai “ideologi”, sesuatu yang harus diterima begitu saja dan dianggap benar, serta berbagai pemikiran fanatik yang berbasiskan agama, ras, kewarganegaraan, atau segala sesuatu yang diyakini dan dianut secara kolektif tanpa dipertanyakan—bisa juga sekte atau aliran-aliran tertentu (Nugroho, 2021).

Berbeda halnya dengan manusia serius, manusia ironis menurut Rorty (1989) adalah mereka yang tidak begitu saja menerima imperatif kategoris, melainkan mempertanyakannya. Dalam beberapa segi, manusia ironis menyadari segalanya tidak lebih sebagai konstruksi, hasil institusionalisasi, atau relasi kuasa yang merasuk ke dalam tubuh; sehingga menciptakan tubuh politik: biopolitik. Manusia ironis pun dapat mengambil jarak darinya karena menganggap semua itu sebagai “ketidaksengajaan” dan bukannya “kesengajaan”. Aspek “penerimaan” menemui kesamaannya dengan manusia serius, hanya saja dengan dampak yang berbeda: ketidaksengajaan sebagai pembuka berbagai peluang baru bagi manusia ironis, sedangkan penerimaan terhadap kesengajaan sebagai penutup berbagai kemungkinan baru untuk manusia serius. Penerimaan manusia ironis pada ketidaksengajaan menyebabkannya lebih terbuka pada

*other* ‘liyan’, memiliki kemampuan berempati, karena bisa jadi ia pun berada dalam posisi liyan akibat ketidaksengajaan.

Dalam konteks politik identitas, konsep manusia ironis dapat membongkar pola pikir dan praktik-praktik fanatisme terhadap agama, keyakinan, ideologi, atau bangsa dan suku bangsa tertentu. Dengan mendasarkan pada keironisan dan ketidaksengajaan, manusia ironis mampu berpikir jika semuanya “terbentuk” atau “dibentuk oleh” (Armin, 2003). Sebagai misal, manusia ironis yang menganut agama tertentu meyakini jika ia menganut agama itu dikarenakan terlahir dari keluarga yang menganut agama itu; jika ia terlahir dari keluarga lain, boleh jadi ia menjadi pemeluk agama lain. Begitu pula, manusia ironis yang beridentitaskan suku bangsa tertentu meyakini jika ia menjadi bagian dari suku bangsa itu dikarenakan kebetulan, yakni ia yang secara tidak sengaja memang terlahir di tengah-tengah masyarakatnya. Ia pun menyadari jika ia terlahir di tengah masyarakat lain, ia akan memiliki identitas suku bangsa yang berbeda, juga dengan bahasa, budaya, dan adat-istiadat yang berbeda.

Apabila konsep manusia ironis diterima secara luas, setiap individu akan menganggap diri mereka sama dan setara karena menyadari bahwa mereka adalah “produk dari ketidaksengajaan”, sebagaimana ungkap Publius Terentius Afer (dalam Douglas dan Johnson, 1977): *homo sum, humani nil a me alienum puto* ‘saya manusia, tidak ada manusia lain yang asing bagiku’. Lebih jauh, tulisan populer dan budaya pop kiranya dapat digunakan untuk mempromosikan konsep manusia ironis pada khalayak luas. Terkait tulisan populer, dahulu sempat terdapat tulisan viral dari seorang anak SMA asal Banyuwangi bernama Afi Nihaya berjudul *Warisan*, terlepas dari perdebatan apakah tulisan tersebut merupakan hasil plagiasi atau tidak, tulisan tersebut sesungguhnya merangkum ide-ide sentral manusia ironis dari Rorty: “*Saya tidak bisa memilih darimana saya akan lahir dan dimana saya akan tinggal setelah dilahirkan*”, demikian cuplikan tulisan *Warisan* yang dibuat Afi. Tulisan tersebut mampu menyentuh banyak pembaca, Afi pun diundang kesana-kemari untuk memaparkan tulisannya.

Lebih jauh, budaya pop yang dimaksudkan disini dapat berupa film, musik, karya sastra, bahkan *meme*. Sebagai misal, terdapat beberapa film populer tanah air yang sedikit-banyak menyadarkan kita akan “ketidaksengajaan eksistensi”, antara lain *Si Doel Anak Sekolahan*, *J-Town*, dan *Adit Sopo Jarwo*; apabila ditilik, film-film atau sinetron tersebut berisi para tokoh dari beragam latar belakang berbeda yang kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Terkait musik, dalam beberapa dekade terakhir agaknya muncul lagu-lagu lokal yang menasional. Hal ini dikarenakan musik atau lagu-lagu lokal tersebut mampu mengangkat pengalaman yang sama, umum, dan dirasakan banyak pihak, hanya saja dengan bahasa dan ekspresi yang berbeda. Bahasa dan ekspresi yang berbeda tersebut menyadarkan kita akan aspek ketidaksengajaan dikarenakan pelantunnya berasal dari daerah yang berbeda, namun mereka berhasil berbagi pengalaman yang sama sebagaimana yang dirasakan atau dihadapi para pendengarnya meskipun berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, hal serupa pun dapat pula diterapkan dalam karya sastra bahkan *meme*.

Menjelang kontestasi politik 2024, kiranya hal yang diharapkan kemudian adalah munculnya tulisan-tulisan viral layaknya tulisan populer Afi Nihaya beberapa tahun lalu, juga berbagai arena budaya pop layaknya film, musik, karya sastra, atau bahkan *meme* yang dipenuhi wacana beresensikan manusia ironis. Serangkaian hal tersebut diharapkan dapat menjadi wacana tanding terhadap isu politik identitas yang berpotensi muncul dalam kontestasi politik 2024. Dengan kata lain, apa yang diharapkan kemudian adalah hadirnya manusia-manusia ironis di bilik-bilik suara pemilu tahun 2024.

#### 4. KESIMPULAN

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk rentan akan isu politik identitas di setiap perhelatan politik, baik di level lokal maupun nasional. Pada dasarnya, politik identitas dibangun oleh konsep identitas yang bersifat esensial. Konsep identitas ini telah menuai

penolakan keras dari arus pemikiran pascastrukturalisme, salah satunya hadir lewat pemikiran tentang manusia ironis dari Richard Rorty. Manusia ironis adalah manusia yang menolak imperatif kategoris, kosakata akhir, dan terbuka bagi setiap kemungkinan. Di samping itu, manusia ironis memiliki kemampuan berempati dengan memosisikan dirinya sebagai liyan dikarenakan prinsip ketidaksengajaan yang dimilikinya. Dalam konteks kontestasi politik tahun 2024, konsep manusia ironis dapat mereduksi isu politik identitas yang berpotensi muncul di tengah masyarakat. Adapun strategi budaya yang bisa ditempuh untuk memperkenalkan pemikiran ini kepada khalayak luas dapat dilakukan melalui tulisan populer dan berbagai saluran budaya pop.

### **Pengakuan**

Penulis berterima kasih kepada berbagai pihak di Universitas Udayana, APSSI, dan secara khusus kepada panitia Konferensi Nasional Sosiologi X yang telah bekerja keras demi terselenggaranya Konferensi Nasional Sosiologi ke-10 di Kupang, NTT pada 7-9 Juni 2023, pun untuk terpublikasikannya *paper* ini.

### **REFERENSI**

- Armin, Adi. 2003. *Richard Rorty: Pendiri Pragmatisme Kontemporer*. Bandung; Teraju.
- Bakker, Anton & Zubair, Achmad Charris. 1994. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta; Kanisius.
- Barker, Chris. 2009. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta; Kreasi Wacana.
- Douglas, Jack & Johnson, John M. 1977. *Existential Sociology*. Cambridge; Cambridge University Press.
- Durkheim, Emile. 2011. *The Elementary Form of the Religious Life*. Yogyakarta; IrciSod.
- Handoyo, Eko (dkk.). 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta; Ombak.
- Harris, Marvin. 2019. *Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir*. Serpong; Marjin Kiri.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Rosda Karya.
- Nugroho, Wahyu Budi. 2020. *Sekilas Representasi menurut Stuart Hall*.  
<https://www.sanglah-institute.org/2020/04/sekilas-representasi-menurut-stuart-hall.html> (diakses pada 2 Mei 2023)
- Nugroho, Wahyu Budi. 2021. *Richard Rorty tentang Manusia Serius dan Manusia Ironis*. <https://www.sanglah-institute.org/2021/03/richard-rorty-tentang-manusia-serius.html> (diakses pada 2 Mei 2023)
- Nugroho, Wahyu Budi. 2021. *Sosiologi Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta; Pustaka Egaliter.
- Rorty, Richard. 1989. *Contingency, Irony, and Solidarity*. United Kingdom; Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Waseso, Mulyadi Guntur. 1986. *Dimensi-Dimensi Psikologi Sosial*. Jakarta; Hanindita.